BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Semakin maraknya penggunaan kendaraan dinas diluar kepentingan dinas di Kota Cimahi menandakan lemahnya instrument hukum pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi terhadap penggunaan aset daerah, padahal sebagaimana diketahui bahwa, penggunaan kendaraan dinas bukan pada peruntukannya merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Penggunaan kendaraan dinas diluar jam dinas dianggap hal yang biasa dan bukan pelanggaran bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi, hal tersebut menandakan pengguna kendaraan dinas tidak memiliki kesadaran hukum atas apa yang dilakukannya, sehingga perlu adanya suatu upaya untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara administratif kepada pejabat yang menggunakan kendaraan dinas diluar peruntukannya.

Beberapa kali NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat) melaporkan kepada pihak kepolisian, namun hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan, akan tetapi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui fungsi pengawasan internal dalam penggunaan aset daerah, karena kendaraan dinas merupakan bagian dari aset daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pendapat hukum terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja ?

2. Bagaimana upaya untuk melakukan penertiban terhadap penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja ?